

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan berperan dalam pembangunan bangsa di semua tingkatan usia. Melalui pendidikan yang berkualitas, dapat dihasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, yang menjadi komponen serta aset utama dalam pembangunan. Misalnya sumber daya alam yang melimpah, modal yang besar, dan ketersediaan teknologi tidak akan bermakna signifikan tanpa adanya SDM yang mumpuni. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM sangat bergantung pada upaya peningkatan pendidikan bangsa.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih dalam tantangan. Berdasarkan laporan *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 78 negara untuk kemampuan membaca dan ke-72 dari 79 negara untuk kemampuan matematika (OECD, 2019). Data ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, laporan dari *World Economic Forum* (2020) mengenai *Global Competitiveness Index* juga menyoroti bahwa rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan SDM unggul di Indonesia. Di wilayah pedesaan, akses pendidikan sering kali lebih terbatas dibandingkan dengan wilayah perkotaan, yang menciptakan ketimpangan dalam kesempatan belajar (Ayuningtyas, 2021; Siska & Rudagi, 2021). Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai, seperti kurangnya akses internet di daerah terpencil, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang

semakin penting di era digital (Siska & Rudagi, 2021)

Dalam konteks administrasi publik, pendidikan berperan krusial. Administrasi publik yang efektif memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dan memiliki kapasitas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik dengan baik. Kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik mendukung terbentuknya birokrasi yang kompeten dan profesional. Kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan SDM di dalamnya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pelatihan yang mereka terima (Dwiyanto, 2011). Administrasi publik juga memainkan peran penting dalam memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik, termasuk melalui distribusi anggaran, manajemen sekolah, serta pengawasan mutu pendidikan (Cheema & Rondinelli, 2007). Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas layanan publik dan kinerja administrasi publik akan meningkat, mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Berdasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Dalam konteks operasionalisasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut, fokus utama diarahkan pada pembangunan sektor pendidikan. Pendidikan bukan hanya menjadi aspek penting dalam struktur pembangunan, tetapi juga merupakan pilar strategis yang tak tergantikan oleh sektor lainnya. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, pendidikan telah menjadi komitmen nasional yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Tilaar (2000), bahwa

pendidikan berperan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Oleh karena itu, isu pendidikan memegang posisi sentral yang membutuhkan kajian serta pengembangan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Peran pendidikan di era globalisasi dianggap sebagai kekuatan utama dalam membangun komunitas sosial. Bahkan, perannya semakin penting untuk menyeimbangkan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang terus berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan, pembentukan karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dengan tujuan utama memfasilitasi berkembangnya potensi peserta didik. Hal ini agar peserta didik dapat menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, berpengetahuan luas, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan pendapat Tilaar (2000), pendidikan berperan tidak hanya sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai panduan dalam membentuk potensi peserta didik sesuai dengan identitas dan kemampuan mereka. Dengan demikian, pendidikan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan global, beradaptasi dengan perubahan, dan bersaing dalam dunia yang dinamis dan kompleks.

Pendidikan tidak hanya berperan sebagai kanal untuk menyampaikan

pengetahuan kepada individu, tetapi juga berfungsi sebagai wadah yang penting dalam membentuk karakter, membangun sikap, dan memberdayakan potensi individu secara menyeluruh. Dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan nasional, pendidikan sebagai kunci utama dalam membentuk generasi yang mampu tidak hanya untuk mengakses pengetahuan, tetapi juga untuk memanfaatkannya secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menjadi sarana untuk mempersiapkan individu secara akademis, tetapi juga untuk membentuk mereka menjadi warga yang aktif dan berkontribusi dalam memajukan masyarakat dan negara menuju taraf kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dengan adanya sistem pendidikan yang efektif dan inklusif, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, mencapai kesuksesan, serta berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih kompetitif dan berdaya saing (Nofiaturrahmah, 2022). Kehadiran pendidikan, tidak hanya berperan sebagai panduan dalam mengarahkan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menginternalisasi dan mendorong penerimaan serta penerapan nilai-nilai tertentu, seperti rasa hormat, tanggung jawab, spiritualitas, keadilan, empati, kejujuran, dan sikap gotong-royong. Pendidikan karakter membantu peserta didik memahami, menghargai, dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial mereka sehingga mereka menjadi insan-insan yang berkarakter (Yandri, 2022).

Konsep karakter juga erat hubungannya dengan moral, agama, budaya, adat istiadat, dan etika yang berlaku dalam suatu masyarakat. Salah satu prioritas

pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU No 17 Tahun 2007) adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat pembentukan karakter generasi bangsa, yang merupakan aspek kunci dalam mencapai hasil yang diharapkan dalam proses pembangunan masyarakat dan negara. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya sinergi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka perlu bertindak secara konsisten dan memberikan teladan yang baik dalam hal moralitas, karena generasi mendatang cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang-orang di sekitar mereka. Pendidikan karakter juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehingga orang memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk menggunakan kebajikan dalam kehidupan mereka (Astuti, 2023)

Empat strategi dapat diterapkan untuk memperkuat pendidikan karakter. Pertama adalah strategi perhitungan, di mana langkah-langkah konkret dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai karakter ditanamkan secara efektif dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Kedua adalah strategi pemodelan, yaitu para pemimpin dan pengajar menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan sikap moral yang diharapkan dari peserta didik. Ketiga adalah strategi fasilitasi, yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar pendukung perkembangan karakter, termasuk melalui program penghargaan dan pengakuan atas prestasi moral. Terakhir, strategi pengembangan kapasitas bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pendidik dalam mendukung pembentukan karakter peserta didik. Dengan menerapkan pendidikan karakter secara konsisten, kita dapat merespons tantangan globalisasi dengan cara yang membangun peradaban bangsa, memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya unggul dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal moral dan etika, yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan masyarakat kita. Pendidikan karakter bertujuan membentuk individu yang beradab serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain (Soraya, 2020).

Sebagai elemen utama dalam pembangunan, pendidikan berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Melalui pendidikan, seseorang dapat memahami lingkungan sekitar, mengembangkan keterampilan, serta membangun karakter yang kuat dan bertanggung jawab, sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas. Negara yang mampu menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan tenaga kerja yang terlatih, terampil, dan kreatif. Hal ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan tingkat produktivitas dan daya saing negara tersebut di tingkat global. Investasi dalam bidang pendidikan bukan hanya merupakan langkah strategis untuk masa depan yang lebih baik, tetapi juga merupakan investasi dalam pembangunan jangka panjang suatu bangsa.

Kesejahteraan suatu masyarakat merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor, di antaranya adalah kemiskinan dan pendidikan, yang merupakan dua aspek yang mempengaruhi satu sama lain. Tingkat kemiskinan yang tinggi dalam suatu masyarakat seringkali menjadi hambatan yang signifikan dalam

akses dan kualitas pendidikan yang tersedia, karena terkait erat dengan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Pentingnya ketersediaan dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas tidak dapat diabaikan dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya memperkuat sistem pendidikan, termasuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, menjadi sangat penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dengan mendorong akses pendidikan yang lebih merata dan meningkatkan standar mutu pendidikan, kita dapat membuka peluang yang lebih besar bagi seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, investasi dalam pendidikan juga dapat menjadi investasi jangka panjang yang berkelanjutan dalam pembangunan manusia, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.

Beragam upaya dalam memperkuat sistem pendidikan, seperti pemerataan akses dan peningkatan kualitas, berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, mengatasi permasalahan kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendidikan menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan (Rohaeni & Saryono, 2018). Tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali menjadi penghambat utama bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak. Padahal, pendidikan memiliki peran strategis dalam membantu individu dan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan mereka (Rohaeni & Saryono, 2018).

Pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun, cita-cita ini belum sepenuhnya terwujud secara merata, terutama di kalangan masyarakat miskin yang paling rentan. Laporan Kementerian PPN/Bappenas (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah masih menjadi salah satu tantangan utama. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pendidikan, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala dalam distribusi yang merata, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan tujuan Pasal 34 UUD 1945 masih memerlukan peningkatan dalam efektivitas dan pemerataan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah perlu meningkatkan upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah untuk mengatasi tantangan ini, termasuk penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, pelatihan tenaga pendidik berkualitas, serta penyediaan sumber daya pembelajaran yang mencukupi. Dengan mendorong pemerataan pendidikan yang lebih luas dan merata, kita dapat membuka pintu kesempatan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

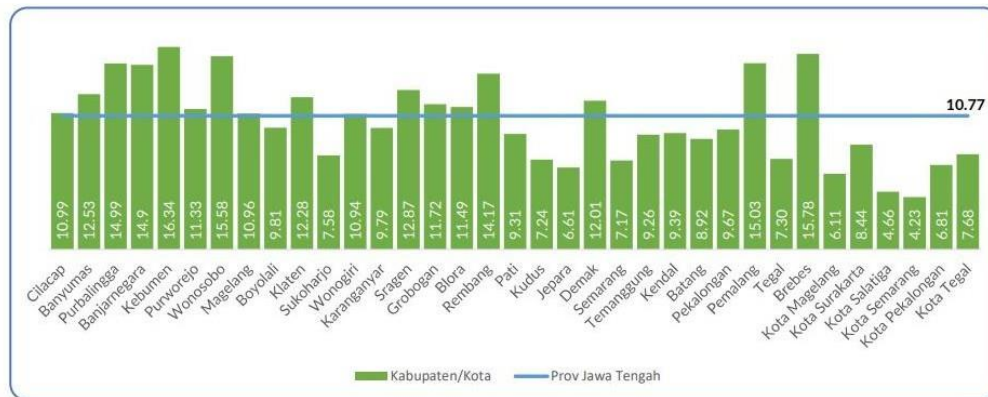
Dalam konteks administrasi publik, pemerintah memiliki peran sentral sebagai agen utama dalam penyediaan pelayanan publik, bertujuan memenuhi

kebutuhan masyarakat (*service provider*). Dengan hasil reformasi yang telah dilakukan, pemerintah memperkenalkan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Desentralisasi dalam pelayanan publik membawa implikasi signifikan, menciptakan beragam isu dan tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu isu yang muncul adalah variasi dalam cakupan dan kualitas pelayanan antar daerah, yang disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di setiap wilayah. Selain itu, lokalisasi dari praktek pelayanan publik dapat menghasilkan perbedaan pendekatan dan kebijakan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini dapat memunculkan konflik di dalam penyelenggaraan layanan antar daerah pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Meskipun desentralisasi dapat memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, namun juga menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi secara bijaksana demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan publik secara keseluruhan. Perbedaan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan publik merupakan suatu kenyataan yang sulit dihindari. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam cakupan, volume, dan kualitas layanan antar wilayah (Dwiyanto, 2015: 28-29).

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2023 mencapai 11,49%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% (BPS, 2023). Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 99,61 ribu jiwa, Kabupaten Blora menempati peringkat ke-23 dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Kondisi ini menuntut kebijakan dan program strategis dari pemerintah daerah untuk

menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Grafik berikut menyajikan gambaran persentase dan jumlah penduduk miskin di Blora dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan daerah lainnya.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1. 1 Statistik Kemiskinan Jawa Tengah 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka partisipasi sekolah untuk anak-anak berusia 16-18 tahun di Kabupaten Blora menunjukkan hasil yang masih perlu perhatian serius. Dengan tingkat partisipasi sekolah hanya mencapai 78,43%, kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seperlima remaja dalam kelompok usia tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tren serupa juga terlihat dalam dua tahun sebelumnya, di mana angka partisipasi sekolah pada usia 16-18 tahun masih berada di bawah 80%. Situasi ini mencerminkan tantangan yang cukup besar dalam mendorong keberlanjutan pendidikan hingga tingkat menengah atas, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Berikut adalah tabel tentang angka partisipasi sekolah di Kabupaten Blora tahun 2021-2023.

Tabel 1. 1 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Blora

Kelompok Umur Sekolah ↑↓	Angka Partisipasi Sekolah								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	2021 ^{↑↓}	2022 ^{↑↓}	2023 ^{↑↓}	2021 ^{↑↓}	2022 ^{↑↓}	2023 ^{↑↓}	2021 ^{↑↓}	2022 ^{↑↓}	2023 ^{↑↓}
7 - 12 tahun	-	-	99,46	-	-	100,00	99,88	99,90	99,75
13 - 15 tahun	97,77	97,48	91,29	100,00	95,90	100,00	98,82	96,63	95,48
16 - 18 tahun	73,21	75,34	76,31	74,29	81,07	81,05	73,75	78,21	78,43
Angka Partisipasi Sekolah									
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)									

Sumber : BPS Kab Blora, 2024

Merujuk pada data yang telah disampaikan, angka partisipasi sekolah untuk anak-anak berusia 16-18 tahun yang mengacu pada pendidikan menengah atas (SMA/SMK) di Kabupaten Blora menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Tingkat partisipasi sekolah untuk kelompok usia ini, baik laki-laki maupun perempuan, hanya mencapai 78,43%. Hal ini berarti sekitar 1 dari 5 remaja dalam rentang usia tersebut tidak melanjutkan pendidikan mereka kejenjang menengah atas. Angka ini mencerminkan kondisi serupa pada dua tahun sebelumnya, di mana tingkat partisipasi sekolah untuk usia 16-18 tahun terus berada di bawah 80%. Ketidakefektifan ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam upaya untuk tetap bersekolah hingga tingkat menengah atas.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam akses pendidikan di Kabupaten Blora, yang mempengaruhi kesetaraan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Fenomena ini menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan progresif, yang tidak hanya memastikan akses pendidikan bagi semua anak, tetapi juga memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang membutuhkan untuk mewujudkan hak pendidikan mereka. Diperlukan langkah-

langkah pemerintah daerah terkait untuk mengatasi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan. Langkah-langkah ini dapat berupa program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, atau insentif lainnya.

Mengacu pada dua data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, dapat terlihat dengan jelas bahwa Kabupaten Blora menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan. Dengan angka kemiskinan mencapai 11,49%, melebihi garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77%, dan angka partisipasi sekolah untuk anak berusia 16-18 tahun hanya sebesar 78,43%, masalah-masalah ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan.

Menurut para ahli, salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pendidikan seringkali dianggap sebagai beban ekonomi daripada investasi jangka panjang. Misalnya, menurut penulisan yang dilakukan oleh World Bank (2020), banyak keluarga di Indonesia yang masih memandang pendidikan sebagai biaya tambahan yang memberatkan, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, juga menjadi hambatan signifikan. Kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak sampai secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkannya. Misalnya, program beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga tidak

menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Hal ini diperparah dengan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil, yang membuat akses pendidikan menjadi sulit dijangkau. Menurut UNESCO (2021), akses pendidikan yang merata sangat penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, namun di Indonesia, distribusi fasilitas pendidikan masih belum merata. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan juga menjadi penghalang utama. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan. Sosialisasi yang kurang efektif membuat banyak anak, terutama di daerah pedesaan, lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah. Ini diperkuat oleh pendapat dari pakar pendidikan, Suyanto (2021), yang menyatakan bahwa "Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan, namun tanpa pemahaman yang baik dan sosialisasi yang tepat, banyak keluarga tidak menyadari manfaat jangka panjang ini."

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan akses pendidikan. Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Selain itu, kampanye edukasi yang intensif tentang pentingnya pendidikan harus terus digalakkan, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan media massa untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah setempat perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan sebagai salah satu upaya strategis mengurangi tingkat kemiskinan

dalam konteks pembangunan daerah. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan diyakini dapat memberikan dampak positif jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan yang baik dapat membuka peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi individu, sehingga mampu bersaing di pasar kerja.

Karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, maka pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan perlu dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan kualitas, efektivitas, serta efisiensi. SPM berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kinerja layanan pendidikan dasar serta menjadi pedoman dalam perencanaan program dan alokasi anggaran di setiap daerah. Untuk memastikan standar mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota, pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait SPM melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (4), pelaksanaan kewajiban pemerintahan yang berlandaskan SPM dilakukan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara regulasi nasional dan implementasi di tingkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Permasalahan mutu dan kualitas pendidikan yang terjadi di Indonesia menjadi fokus perhatian yang mendalam, terutama terlihat dari rendahnya pencapaian prestasi siswa. Prestasi belajar siswa menjadi salah satu indikator yang jelas dalam menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan. Tercermin dari hasil

evaluasi dan ujian yang menunjukkan kurangnya penguasaan materi yang diharapkan. Rendahnya kualitas pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai komponen. Menurut Mulyana (2009: 93) komponen-komponen tersebut antara lain: 1) siswa; 2) guru sebagai tenaga pendidik; 3) administrasi; 4) kurikulum; 5) keuangan; 6) sarana dan prasarana sebagai instrumental. Komponen-komponen yang telah disebutkan memiliki dampak yang signifikan terhadap mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah tersebut mencakup ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, variasi dalam kualitas pengajaran di berbagai lembaga pendidikan, keterbatasan fasilitas belajar yang memadai, serta minimnya dukungan dari lingkungan pendidikan dan masyarakat secara umum..

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola serta menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelayanan publik tersebut mencakup penyediaan barang, jasa, serta layanan administratif yang diberikan kepada masyarakat. Sejalan dengan visi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Blora dilakukan secara sistematis dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan SPM ini melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta guna meningkatkan efektivitas pelayanan. Dalam sektor pendidikan, khususnya dalam

aspek pembiayaan, penerapan SPM berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Blora memiliki kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas tanpa terkendala ekonomi.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sektor pendidikan menegaskan kewajiban pemerintah Kabupaten Blora untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses sama terhadap pendidikan tanpa terkendala finansial. Realisasi dari kewajiban ini menjadi krusial dalam memastikan hak-hak pendidikan setiap individu di Kabupaten Blora terpenuhi secara adil dan merata. Dalam prakteknya, realisasi bantuan biaya pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu di Kabupaten Blora dapat dilakukan melalui berbagai program bantuan dan insentif finansial yang dirancang secara inklusif. Program-program ini dapat mencakup pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi, bantuan biaya sekolah untuk membayar uang pangkal, seragam, buku-buku pelajaran, dan biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan.

Pemerintah kabupaten juga dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya untuk menggalang dana dan sumber daya yang diperlukan guna mendukung program bantuan biaya pendidikan. Kerjasama ini penting untuk memperluas cakupan dan efektivitas dari program-program tersebut sehingga dapat mencakup sebanyak mungkin keluarga yang membutuhkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Pemerintah kabupaten diharapkan untuk menyediakan

informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kriteria penerima bantuan, proses aplikasi, dan penggunaan dana agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa bantuan biaya pendidikan disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Latar belakang ini menyoroti pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sektor pendidikan, khususnya di Kabupaten Blora. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sebagai langkah awal dalam memastikan hak pendidikan setiap anak terpenuhi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan (Kemendikbud, 2018).

Dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan dengan efektif dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Blora untuk kelompok usia 16-18 tahun hanya mencapai 78,43%, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (BPS Blora, 2023). Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora yang mencapai 11,49% juga menjadi faktor yang menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (BPS Jawa Tengah, 2023). Sehingga, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi, mengatasi, dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Pentingnya kesetaraan

akses terhadap pendidikan menjadi landasan utama bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Blora. Dengan memastikan bahwa tidak ada anak yang terpinggirkan dari pendidikan akibat kendala biaya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua anak di Kabupaten Blora. Ini memerlukan kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi yang efektif dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan juga merupakan aspek penting. Dengan memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat, kita dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan dengan tepat sasaran. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008). Selain itu, laporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik dalam program bantuan pendidikan dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana dan mencegah penyimpangan dalam penyalurannya (Kemendikbudristek, 2022). Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Blora juga dapat terjaga.

Perlu adanya evaluasi dan pemantauan yang berkala terhadap program

bantuan biaya pendidikan untuk memastikan bahwa program-program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memantau capaian dan tantangan yang dihadapi, kita dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari program-program tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya siklus evaluasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan pendidikan, yang berkontribusi pada perbaikan terus-menerus dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Realisasi bantuan biaya pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu di Kabupaten Blora merupakan langkah penting dalam memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), implementasi program bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah di berbagai daerah, termasuk Blora (Kemendikbudristek, 2023). Namun, efektivitas realisasi bantuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam distribusi yang tepat sasaran dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.

Kabupaten Blora memiliki tingkat kemiskinan sebesar 11,49%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yang menjadi salah satu faktor utama rendahnya angka partisipasi sekolah (BPS Blora, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SPM pendidikan, yang seharusnya menjamin layanan dasar pendidikan bagi seluruh peserta didik, masih menghadapi kendala dalam hal pemerataan dan efektivitas kebijakan.

Hal ini menunjukkan pentingnya mengkaji implementasi SPM di bidang pendidikan di Kabupaten Blora, guna mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Melalui pendekatan yang berbasis data dan evaluasi kebijakan yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Blora.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora mempengaruhi akses anak-anak terhadap pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Blora mencapai 11,49%, melebihi rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77%. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, sehingga menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pendidikan, khususnya dalam memastikan akses pendidikan dasar yang merata bagi seluruh peserta didik.
2. Kesadaran dan nilai pendidikan, terutama terkait kesetaraan akses pendidikan, masih rendah. Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Blora untuk kelompok usia 16-18 tahun hanya mencapai 78,43%, yang berarti hampir seperlima remaja tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan seperti bantuan biaya sekolah telah diterapkan, efektivitas implementasi SPM

pendidikan, yang mencakup penyediaan layanan pendidikan wajib minimal 12 tahun, masih belum optimal.

3. Ketidakefektifan implementasi kebijakan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Meskipun terdapat berbagai program bantuan pendidikan, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan sehingga belum sepenuhnya memenuhi target SPM pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan partisipasi pendidikan di Kabupaten Blora, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada telah memenuhi standar pelayanan minimal dalam pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terutama bagi peserta didik kurang mampu di Kabupaten Blora Tahun 2023?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan bagi peserta didik kurang mampu di Kabupaten Blora?

1.4 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan untuk peserta didik kurang mampu di Kabupaten Blora. Dengan mengidentifikasi proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan.
2. Mengidentifikasi Faktor pendukung dan faktor penghambat yang terkait

dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terutama bagi peserta didik kurang mampu di Kabupaten Blora.

1.5 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

Memperluas pemahaman tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan bagi peserta didik kurang mampu di Kabupaten Blora. Mengembangkan keterampilan penulisan, analisis data, dan pemecahan masalah melalui pengalaman langsung dalam melakukan studi kasus. Membangun portofolio penulisan yang relevan dan bermanfaat untuk pengembangan karier akademis atau profesional di masa depan.

2. Kontribusi Akademis

Menyumbangkan pengetahuan baru dan wawasan tentang implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal, yang dapat menjadi referensi bagi penulis, akademisi, dan praktisi dalam bidang pendidikan. Memperkaya literatur akademis dengan temuan empiris tentang efektivitas program pemenuhan biaya pendidikan untuk peserta didik kurang mampu, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik di bidang tersebut.

3. Pemerintah Kabupaten Blora

Memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan terutama bagi peserta didik kurang mampu di Kabupaten Blora, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan di masa mendatang. Menyediakan rekomendasi

yang konkret dan berbasis bukti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Blora. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pendidikan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di wilayah tersebut

1.6 Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan judul	Tujuan	Hasil Temuan
1.	Lalu Muhammad Zainuddin (2021) / Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Pendidikan Dasar Terhadap Akses Pendidikan Anak Usia Sekolah dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan dasar terhadap akses pendidikan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Lombok Timur.	Penulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan dasar terhadap akses pendidikan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Lombok Timur adalah: Faktor Ekonomi: Pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Faktor Sosial: Tingkat pendidikan orang tua, status sosial ekonomi keluarga, dan norma-norma sosial yang terkait dengan pendidikan. Faktor Budaya: Nilai-nilai budaya yang terkait dengan pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan bahasa pengantar di sekolah. Faktor Kebijakan: Kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar, termasuk kebijakan afirmatif untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

			Faktor Kualitas Layanan Pendidikan: Kualitas guru, infrastruktur sekolah, dan ketersediaan bahan ajar.
2.	Ririn Afriani (2020) / Dampak Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Terhadap Kualitas Belajar Mengajar di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020	Analisis dampak implementasi SPM Pendidikan terhadap kualitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bengkulu Tengah.	Penulisan ini menemukan bahwa implementasi SPM Pendidikan di SDN di Kabupaten Bengkulu Tengah berdampak positif terhadap kualitas belajar mengajar. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ujian nasional siswa, meningkatnya motivasi belajar siswa, dan meningkatnya kerjasama antara guru dan orang tua.
3.	Intan Nurhayati (2019)/ Analisis Faktor Penghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019	Analisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo.	Penulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi SPM Pendidikan di SDN di Kabupaten Sidoarjo adalah: Kurangnya sosialisasi kebijakan: Para pemangku kepentingan belum memahami secara menyeluruh tentang SPM Pendidikan dan indikator-indikatornya. Keterbatasan sumber daya: Sekolah kekurangan dana, guru, dan sarana prasarana untuk memenuhi indikator-indikator SPM Pendidikan. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan: Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan Masyarakat
4.	M. Agus Suwarno (2021) / Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan	Analisis efektivitas kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam	Penulisan ini menemukan bahwa kebijakan BOS efektif dalam meningkatkan akses dan

	Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Sekolah dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021	meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Gunungkidul.	mutu pendidikan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya nilai ujian nasional siswa.
5.	Sri Rahayu (2020) / Peran Keluarga dalam Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Sekolah dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Sleman Tahun 2020	Analisa tentang peran keluarga dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Sleman.	Penulisan ini menemukan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Sleman. Peran tersebut antara lain: Memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak: Orang tua memberikan dukungan dan motivasi kepada anak untuk belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Membantu anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah: Orang tua membantu anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dan memahami materi pelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah: Orang tua menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dengan menyediakan ruang belajar yang nyaman dan tenang, serta menyediakan buku-buku dan alat tulis yang dibutuhkan anak.
6.	Dian Anggraini (2021)/ Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Penulisan kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Menemukan bahwa implementasi SPM Pendidikan di SDN di Kecamatan Gubeng

	Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri: Studi Kasus di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Tahun 2021		Kota Surabaya memiliki beberapa tantangan, seperti: Kurangnya sosialisasi kebijakan SPM Pendidikan kepada para pemangku kepentingan. Keterbatasan sumber daya, seperti dana, guru, dan sarana prasarana sekolah. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang indikator-indikator SPM Pendidikan.
7.	Evi Nurhayati (2020)/ Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul Tahun 2020.		Menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi SPM Pendidikan di SDN di Kabupaten Bantul adalah: Kualitas guru: Kualitas guru yang baik, seperti memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, pengalaman mengajar yang memadai, dan motivasi kerja yang tinggi, dapat meningkatkan kinerja implementasi SPM Pendidikan. Sarana prasarana sekolah: Sarana prasarana sekolah yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan yang lengkap, dan laboratorium yang modern, dapat meningkatkan kinerja implementasi SPM Pendidikan.

			Dukungan dana pendidikan: Dukungan dana pendidikan yang memadai dari pemerintah dapat membantu sekolah dalam memenuhi indikator-indikator SPM Pendidikan. Kerjasama antar pemangku kepentingan: Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan kinerja implementasi SPM Pendidikan.
8.	Anik Sunarni, Wahyu Widodo (2021)/ Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Bantul	Meneliti bagaimana implementasi SPM di bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bantul dan mengevaluasi efektivitasnya.	Implementasi SPM di Kabupaten Bantul telah menunjukkan peningkatan akses pendidikan dasar, namun masih terdapat tantangan dalam distribusi sumber daya dan kualitas pendidikan antar sekolah.
9.	Diah Ayu Lestari (2020)/ Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota Surabaya 2020	Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi SPM pendidikan di Kota Surabaya serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.	Temuan menunjukkan bahwa meskipun Kota Surabaya memiliki infrastruktur pendidikan yang baik, terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
10.	Yuni Kurniawati (2019) / Meneliti dampak implementasi SPM terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.	Meneliti bagaimana dampak implementasi SPM terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya	Penulisan ini menemukan bahwa SPM memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi sekolah dan kualitas tenaga pendidik.
11.	Ahmad Fajar, Rizky Ramadhan (2022)/ Analisis Implementasi SPM Pendidikan	Analisa tentang sejauh mana implementasi SPM di bidang pendidikan dasar di	Menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus telah berhasil meningkatkan akses pendidikan dasar, tetapi masih perlu perbaikan dalam

	di Kabupaten Kudus 2022	Kabupaten Kudus dan menilai pencapaiannya.	kualitas layanan pendidikan terutama di daerah terpencil.
12.	Siti Nurhaliza (2023) / Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo 2023	Meneliti implementasi SPM di Kabupaten Sidoarjo dan mengevaluasi efektivitas program bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu.	Ditemukan bahwa program bantuan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan bagi keluarga kurang mampu, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan administrasi dan monitoring program.
13.	Nining Fitriyani, Hendrianto Wibowo (2020) / Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Magelang: Studi Kasus Sekolah Dasar (2020)	Mengevaluasi implementasi SPM Pendidikan di Kabupaten Magelang, khususnya pada tingkat sekolah dasar, dengan fokus pada upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar untuk keluarga kurang mampu.	Menunjukkan bahwa implementasi SPM di Kabupaten Magelang telah meningkatkan jumlah anak usia sekolah dasar yang bersekolah, namun terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari keluarga kurang mampu dibandingkan dengan siswa dari keluarga mampu. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas SPM adalah keterbatasan dana, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, dan infrastruktur yang belum memadai di beberapa wilayah terpencil.
14.	Sri Handayani , Ahmad Syukron (2021) / Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Malang: Perspektif Guru dan Siswa	Mengevaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Malang, dengan mengambil perspektif dari guru dan siswa mengenai kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang diberikan.	Menemukan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dari pemerintah daerah dalam menerapkan SPM, banyak guru dan siswa yang merasa bahwa kualitas pendidikan masih belum optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, serta fasilitas sekolah yang tidak memadai. Namun,

			program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu telah membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah secara keseluruhan.
15.	Rina Puspitasari, Dian Wahyuni (2022) / Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Sleman: Analisis terhadap Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2022	Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sleman, dengan fokus khusus pada efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mendukung pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.	Menunjukkan bahwa Program BOS di Kabupaten Sleman telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh distribusi dana yang tidak merata, transparansi penggunaan dana yang kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat. Penulisan ini merekomendasikan peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan bagi manajemen sekolah untuk memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien.
16.	Sarah J. Steiner (2023) / The Impact of Minimum Service Standards on Educational Equity in Developing Countries: A Case Study of Indonesia	Menganalisis dampak implementasi SPM Pendidikan terhadap kesetaraan pendidikan di negara-negara berkembang, dengan fokus pada kasus di Indonesia.	Penulisan ini menemukan bahwa implementasi SPM Pendidikan di Indonesia memiliki dampak positif terhadap kesetaraan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu, menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya nilai ujian nasional siswa.
17.	Peter J. Hunter (2020) / The Effectiveness of Minimum Service Standards in	Menganalisis efektivitas implementasi SPM Pendidikan dalam meningkatkan	Penulisan ini menemukan bahwa implementasi SPM Pendidikan di negara-

19.	Maria Alice Rezende (2022) / The Role of Minimum Service Standards in Promoting Inclusive Education: A Case Study of Brazil	Analisis peran SPM Pendidikan dalam mempromosikan pendidikan inklusif di Brasil.	Penulisan ini menemukan bahwa implementasi SPM Pendidikan di Brasil memiliki dampak positif terhadap pendidikan inklusif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus yang bersekolah di sekolah reguler, meningkatnya kualitas pendidikan yang mereka terima, dan meningkatnya partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah.
20.	Kevin M. Crooks (2019) / The Challenges of Implementing Minimum Service Standards in Developing Countries: A Comparative Analysis of Indonesia, Thailand, and Vietnam (2019)	Analisis tantangan implementasi SPM Pendidikan di negara-negara berkembang, dengan fokus pada kasus di Indonesia, Thailand, dan Vietnam.	Penulisan ini menemukan bahwa implementasi SPM Pendidikan di Indonesia, Thailand, dan Vietnam memiliki berbagai tantangan, seperti: Kurangnya sumber daya: Ketiga negara ini masih kekurangan sumber daya yang memadai untuk memenuhi indikator-indikator SPM Pendidikan, seperti dana, guru, dan infrastruktur sekolah. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah dalam implementasi SPM Pendidikan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang SPM Pendidikan: Masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang SPM Pendidikan dan indikator-indikatornya.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penulisan tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menyoroti berbagai aspek dan faktor pendukung dan serta penghambat dalam efektivitas program ini dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam analisis ini, dapat dilihat persamaan dan perbedaan utama dari penulisan-penulisan terdahulu yang telah dikumpulkan :

1. Persamaan

1. Fokus pada Akses dan Kualitas Pendidikan:

Sebagian besar penulisan, seperti yang dilakukan oleh Lalu Muhammad Zainuddin (2021) dan Ririn Afriani (2020), fokus pada bagaimana SPM dan kebijakan pendidikan lainnya mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka menekankan pentingnya akses lebih luas dan peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah dasar.

2. Faktor Ekonomi dan Sosial:

Banyak penulisan menyoroti faktor ekonomi dan sosial sebagai penentu utama dalam implementasi SPM. Misalnya, penulisan oleh Intan Nurhayati (2019) dan Sri Rahayu (2020) menyoroti pengaruh pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan status sosial ekonomi terhadap efektivitas implementasi SPM.

3. Peran Kebijakan Pemerintah:

Penulisan seperti yang dilakukan oleh M. Agus Suwarno (2021) dan Nining Fitriyani (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk alokasi dana dan kebijakan afirmatif, berperan besar dalam

menentukan keberhasilan SPM di bidang pendidikan. Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah contoh konkret yang sering dibahas. Kendala Implementasi:

Banyak penulisan mengidentifikasi kendala dalam implementasi SPM, termasuk kurangnya sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan sosialisasi kebijakan yang kurang efektif. Penulisan oleh Dian Anggraini (2021) dan Intan Nurhayati (2019) menyoroti masalah ini secara mendalam.

2. Perbedaan

1. Metode dan Pendekatan:

Terdapat variasi dalam pendekatan metodologis yang digunakan oleh penulis. Beberapa penulisan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan, seperti yang dilakukan oleh Evi Nurhayati (2020), sementara yang lain menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus, seperti yang dilakukan oleh Dian Anggraini (2021).

2. Spesifikasi Faktor Penghambat:

Meskipun banyak penulisan mengidentifikasi faktor penghambat, rincian spesifiknya dapat berbeda. Intan Nurhayati (2019) lebih menekankan kurangnya sosialisasi kebijakan dan keterbatasan sumber daya, sedangkan Sri Handayani dan Ahmad Syukron (2021) lebih fokus pada kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru.

3. Rekomendasi Kebijakan:

Setiap penulisan memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik

berdasarkan temuan mereka. Misalnya, Rina Puspitasari dan Dian Wahyuni (2022) merekomendasikan peningkatan mekanisme pengawasan dan pelatihan bagi manajemen sekolah, sedangkan penulisan lain mungkin lebih menekankan perlunya peningkatan dana atau fasilitas.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler Administrasi publik merupakan suatu proses yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Menurut Harbani Pasolong (2010), administrasi publik mencerminkan kerja sama antara individu maupun lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif guna memenuhi kebutuhan publik. Sementara itu, Nicholas (dalam Pasolong, 2010) mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan gabungan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Keban (2008) menekankan bahwa administrasi publik menggambarkan bagaimana pemerintah berperan aktif sebagai regulator yang mengambil inisiatif dalam mengatur kebijakan demi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks peran administrasi publik, Gray (dalam Pasolong, 2010) menjelaskan bahwa administrasi publik berfungsi untuk memastikan distribusi pendapatan nasional yang adil bagi masyarakat miskin. Selain itu, administrasi

publik juga berperan dalam melindungi hak-hak kepemilikan serta menjamin kebebasan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti lansia.

1.6.3 Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, serta langkah-langkah strategis dalam pemerintahan atau organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Carl J. Frederick, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:7), menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau usulan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang menghadapi hambatan maupun peluang, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan tidak hanya sebatas gagasan, tetapi juga mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan dalam menangani suatu permasalahan.

Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) menyebutkan bahwa konsep kebijakan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Ia merumuskan beberapa prinsip utama dalam memahami kebijakan, di antaranya bahwa kebijakan berbeda dari keputusan, mencakup tindakan maupun ketidaktindakan, memiliki sasaran eksplisit atau implisit, serta berkembang dalam proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan melibatkan hubungan antarorganisasi maupun intraorganisasi serta berperan dalam mengarahkan institusi pemerintahan.

Sementara itu, Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian aktivitas pemerintah dalam menangani masalah

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berperan dalam kehidupan publik. Senada dengan itu, James E. Anderson (dalam Islamy, 2009:17) menyatakan bahwa kebijakan adalah rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, dirancang dan diimplementasikan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

1.6.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi tahap penting dalam kebijakan publik, di mana keputusan yang dibuat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata guna mencapai hasil yang diharapkan. Secara umum, implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan. Menurut Syaukani dkk. (2004:295), implementasi mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar dapat memberikan manfaat sesuai perencanaan. Rangkaian kegiatan ini mencakup:

1. Penyusunan peraturan lanjutan, yaitu pembuatan aturan teknis sebagai interpretasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Persiapan sumber daya, termasuk sarana dan prasarana, anggaran, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Pelaksanaan kebijakan di lapangan, yaitu bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konkret kepada masyarakat.

Menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79), terdapat tiga unsur utama dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Program atau kebijakan yang dilaksanakan – Kebijakan harus dirancang dengan jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif.
2. Kelompok sasaran (target group) – Masyarakat atau kelompok yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dari kebijakan harus dapat mengakses layanan secara optimal.
3. Unsur pelaksana (implementor) – Organisasi atau individu yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai perumus kebijakan tetapi juga birokrasi sebagai pelaksana serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Lipsky (1980) memperkenalkan konsep "street-level bureaucrats", yaitu aparat atau pelaksana di tingkat bawah (seperti guru, tenaga administrasi sekolah, dan petugas dinas pendidikan) yang berperan langsung dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu model implementasi kebijakan yang sering digunakan adalah model Van Meter & Van Horn (Van Meter & Van Horn, 1975 dalam Agustino, 2016). Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Kebijakan harus memiliki standar dan sasaran yang jelas serta dapat diukur. Ketidakjelasan standar dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasi.

2. Sumber Daya Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang mencakup tenaga kerja, anggaran, teknologi, dan infrastruktur. Kurangnya sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
3. Hubungan Antarorganisasi Implementasi sering melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan dengan baik.
4. Karakteristik Agen Pelaksana Struktur organisasi, kultur birokrasi, dan kompetensi pelaksana kebijakan mempengaruhi efektivitas implementasi.
5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi daerah, stabilitas politik, dan dukungan masyarakat memengaruhi implementasi kebijakan.
6. Disposisi (Sikap) Implementor Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi.

Dengan menggunakan model ini, penelitian tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Blora dapat melihat bagaimana faktor-faktor di atas berkontribusi terhadap keberhasilan atau kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

1.6.4 Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.

Proses pelayanan ini terjadi dalam konteks interaksi antara pemberi dan penerima layanan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam bahasa Inggris, pelayanan dikenal dengan istilah *service*. Menurut A.S. Moenir (2002:26-27), pelayanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan dasar tertentu, di mana tingkat kepuasan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang memberikan maupun menerima layanan, bergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi ekspektasi pengguna. Lebih lanjut, Moenir (2002:16) menjelaskan pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui tindakan langsung oleh pihak lain. Dengan demikian, pelayanan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam membantu, menyiapkan, atau mengurus sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain.

Sementara itu, Hardiansyah (2011) mendefinisikan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu maupun organisasi yang memiliki kepentingan tertentu, sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan utama memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendeskripsikan pelayanan publik sebagai rangkaian aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk penyediaan barang, jasa, maupun layanan administratif yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

1.6.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat. SPM bertujuan

untuk menjamin akses serta mutu layanan publik secara merata, sesuai dengan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan wajib. Bagi pemerintah daerah, SPM menjadi tolok ukur dalam menentukan kebutuhan anggaran dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Sementara bagi masyarakat, SPM berfungsi sebagai pedoman mengenai kualitas layanan yang dapat mereka terima, sehingga memastikan bahwa setiap warga memperoleh layanan yang setara sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, SPM membantu pemerintah pusat dalam menjamin bahwa seluruh warga negara mendapatkan pelayanan dasar yang layak, sehingga pemerataan akses layanan publik dapat terwujud. Hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan merupakan acuan bagi penyelenggara dalam memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengatur bahwa standar pelayanan meliputi aspek input (masukan), process (proses), output (hasil), serta manfaat yang dihasilkan dari pelayanan tersebut.

Prinsip-prinsip utama dalam penerapan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mencakup beberapa hal berikut:

1. Menjamin akses serta kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh daerah.
2. Berlaku untuk seluruh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Merupakan bagian dari sistem pelayanan dasar nasional.
4. Bersifat sederhana, transparan, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas daerah, serta kapasitas keuangan dan kelembagaan yang tersedia.

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip berikut:

1. Kesesuaian kewenangan
2. Ketersediaan
3. Keterjangkauan
4. Kestinambungan
5. Keterukuran
6. Ketepatan Sasaran

1.6.4.1 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Standar Pelayanan Pendidikan adalah bagian dari SPM yang khusus mengatur kualitas layanan di sektor pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknik pelayanan minimal pendidikan, Standar Pelayanan Pendidikan mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Implementasi Standar Pelayanan Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Tilaar (2012), penerapan standar ini dapat membantu dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antar

daerah dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Suparno (2019) juga menekankan bahwa standar ini berfungsi sebagai panduan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan.

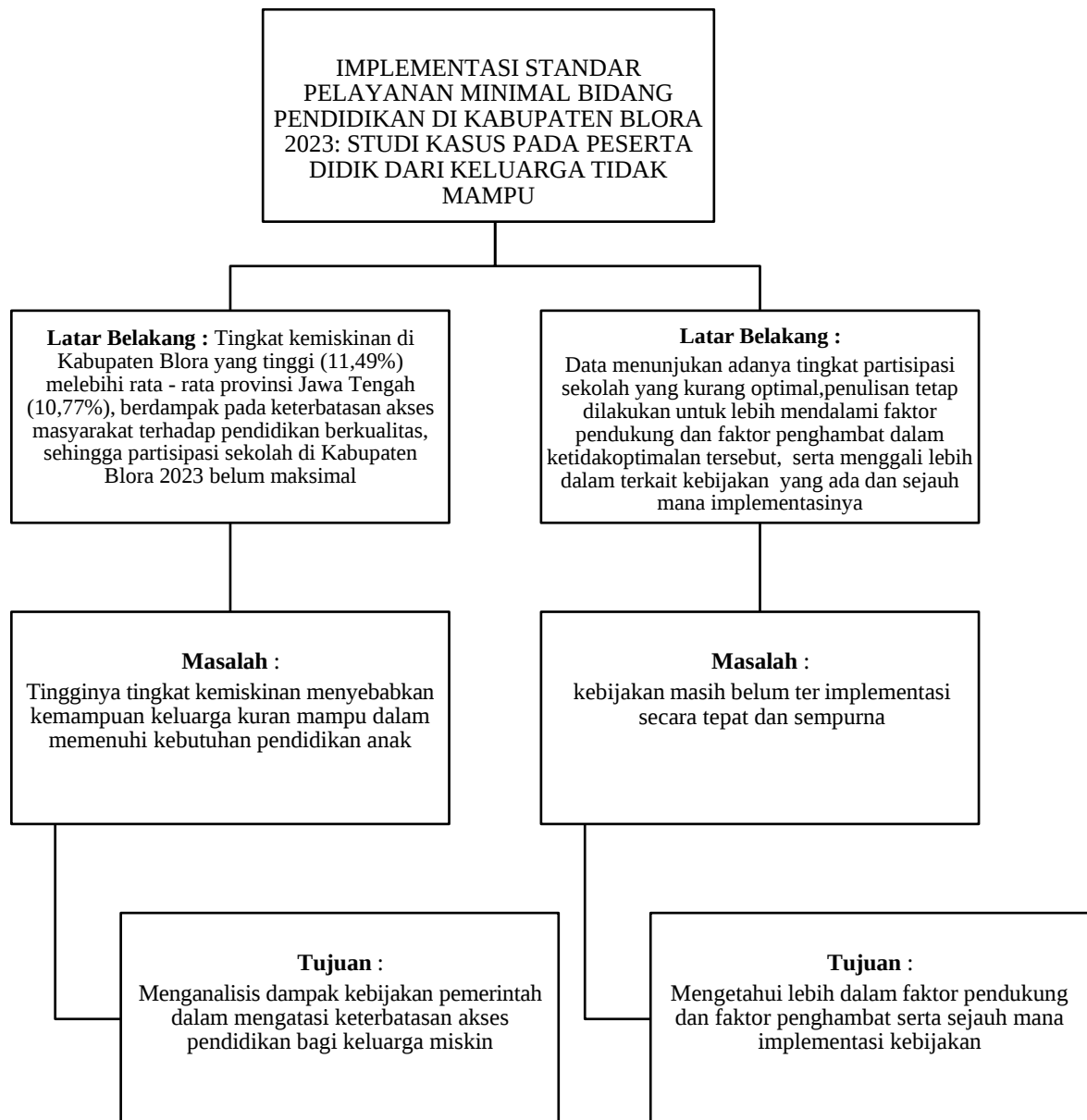
1.6.6 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anies Baswedan (2013) menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas harus mampu membekali generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lebih dari sekadar sarana memperoleh pekerjaan, pendidikan juga berfungsi dalam membentuk karakter serta kepribadian yang kokoh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024 , Nadiem Makarim (2020), dalam beberapa kesempatan juga menekankan pentingnya inovasi dalam pendidikan. Beliau menggarisbawahi bahwa pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pandangan ini selaras dengan konsep pendidikan modern yang mengedepankan fleksibilitas dan kreativitas dalam proses belajar mengajar.

Pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (2003), setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu.

Darmaningtyas (2016) juga menekankan bahwa pendidikan berperan sebagai kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan pendidikan yang baik, kesenjangan sosial serta ekonomi dapat dikurangi, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

1.7 Kerangka Pikir



Gambar 1. 2 Kerangka Pikir

1.8 Operasionalisasi Konsep

Dalam penulisan mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, beberapa konsep kunci yang harus dioperasionalkan adalah akses dan kualitas pendidikan, faktor ekonomi dan sosial, peran kebijakan pemerintah, serta kendala implementasi. Berikut adalah operasionalisasi konsep untuk masing-masing elemen:

1. Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Pendidikan bagi Peserta Didik Kurang Mampu di Kabupaten Blora

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi peserta didik kurang mampu masih menghadapi banyak kendala. Dengan tingkat partisipasi sekolah yang belum sempurna dan angka kemiskinan mencapai 11,49%, banyak anak dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Gejala yang muncul meliputi keterbatasan fasilitas sekolah, rendahnya kompetensi guru, serta ketidakefektifan kebijakan subsidi pendidikan seperti BOS dan KIP. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh enam faktor utama:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan – Kurangnya kesesuaian standar pendidikan menyebabkan ketimpangan dalam layanan pendidikan (Zainuddin, 2021).
2. Sumber Daya – Keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas belajar, dan akses infrastruktur menjadi kendala utama (Afriani, 2020).
3. Hubungan Antarorganisasi – Koordinasi yang lemah antara pemerintah daerah dan sekolah menghambat distribusi bantuan pendidikan (Rahayu,

2020).

4. Karakteristik Agen Pelaksana – Rendahnya kompetensi guru dan kurangnya pelatihan berdampak pada kualitas pendidikan (Nurhayati, 2019).
5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi – Kemiskinan dan rendahnya kesadaran pendidikan menyebabkan partisipasi sekolah rendah (Suwarno, 2021).
6. Disposisi Implementor – Minimnya sosialisasi kebijakan menyebabkan masyarakat kurang memanfaatkan layanan pendidikan (Anggraini, 2021).

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi SPM Pendidikan bagi Peserta Didik Kurang Mampu

Fenomena lain yang terjadi adalah ketimpangan akses pendidikan akibat faktor sosial-ekonomi dan kebijakan yang belum optimal. Gejala yang tampak antara lain keterbatasan sumber daya sekolah di daerah terpencil, alokasi dana yang belum merata, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor dalam implementasi kebijakan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Blora meliputi:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan – Perbedaan standar fasilitas sekolah memperburuk ketimpangan pendidikan (Puspitasari & Wahyuni, 2022).
2. Sumber Daya – Keterbatasan jumlah guru dan minimnya sarana pembelajaran di daerah pedesaan (Handayani & Syukron, 2021).
3. Hubungan Antarorganisasi – Koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum efektif menyebabkan penyaluran bantuan tidak merata (Nurhayati, 2020).

4. Karakteristik Agen Pelaksana – Kurangnya pelatihan bagi guru berdampak pada kualitas pendidikan yang rendah (Anggraini, 2021).
5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi – Faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran pendidikan, dan keterbatasan transportasi mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah (Nurhayati, 2019).
6. Disposisi Implementor – Kurangnya komitmen dalam pengawasan kebijakan menghambat optimalisasi layanan pendidikan (Fitriyani, 2020).

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No	Fokus	Fenomena	Prinsip SPM	Pertanyaan
1.	Implementasi SPM Pendidikan	Kejelasan Standar Kebijakan	Kesesuaian Kewenangan	Bagaimana pemahaman Anda tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan di Kabupaten Blora? (Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah)
			Ketepatan Sasaran	Bagaimana pelaksanaan kebijakan SPM terhadap peserta didik kurang mampu?(Kepala Sekolah)
			Kesinambungan	Bagaimana sosialisasi kebijakan SPM kepada peserta didik kurang mampu?(Kepala Sekolah)
2	Faktor Pendukung dan Penghambat	Ketersediaan Sumber Daya	Ketersediaan	Apakah jumlah guru dan staf pendukung pendidikan mencukupi untuk memenuhi standar pelayanan minimal di sekolah? (Kepala Sekolah)
			Keterukuran	Bagaimana tingkat pemahaman dan pelatihan tenaga pendidik terhadap kebijakan SPM? (Kepala Sekolah)
		Sarana dan Prasarana Penunjang	Ketersediaan	Apakah sarana dan prasarana penunjang pendidikan memadai untuk mendukung implementasi SPM di Kabupaten Blora? (Kepala Sekolah)
			Keterjangkauan	Apakah terdapat bantuan dari pemerintah daerah atau pihak lain untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan? (Kepala Sekolah)
		Koordinasi Antar Pihak Terkait	Kesesuaian	Bagaimana koordinasi antara Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, dan sekolah dalam pelaksanaan SPM? (Dinas Pendidikan dan

				Kepala Sekolah)
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan	Keterukuran	Bagaimana pengaruh pelaksanaan SPM terhadap akses pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu? (Kepala Sekolah)
3.	Dampak Kebijakan SPM bagi peserta didik tidak mampu	Akses Pendidikan	Keterjangkauan	Apakah anda sudah memahami hak untuk mendapatkan akses pendidikan sejak kebijakan SPM diterapkan? (Peserta didik)
			Ketepatan Sasaran	Apakah Anda merasakan kemudahan dalam mendapatkan akses pendidikan sejak kebijakan SPM? (Peserta didik)
			Ketersediaan	Apakah mendapat bantuan berupa biaya ataupun peralatan untuk sekolah? (Peserta didik)
		Kualitas Pendidikan	Kesinambungan	Bagaimana kondisi fasilitas belajar sebagai pendukung proses pembelajaran (Guru dan (Peserta didik)
			Ketepatan Sasaran	Bagaimana guru dan staff sekolah memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu? (Guru dan Peserta didik)
		Kesejahteraan Peserta Didik	Keterukuran	Apakah kebijakan spm (bantuan pendidikan) bagi keluarga kurang mampu membantu meringankan beban ekonomi? (Peserta didik)

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

kasus. Tipe penulisan ini dipilih karena bertujuan untuk mendalami implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan di Kabupaten Blora, khususnya terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu. Penulisan kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali secara mendalam fenomena yang kompleks, memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut (Creswell, 2014). Menurut Moleong (2017), penulisan kualitatif sangat efektif untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang partisipan penulisan, memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi SPM di Kabupaten Blora.

Lebih lanjut, penulisan ini menerapkan metode studi kasus karena metode ini memberikan kesempatan untuk melakukan analisis mendalam terhadap satu atau lebih kasus yang representatif dalam konteks tertentu (Yin, 2018). Studi kasus memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai variabel dan interaksi kompleks yang ada dalam situasi nyata. Seperti yang dinyatakan oleh Stake (2005), studi kasus sangat berguna untuk mengeksplorasi "bagaimana" dan "mengapa" dalam konteks spesifik, sehingga sangat cocok untuk memahami dinamika pelaksanaan SPM di daerah tertentu. Dalam konteks ini, metode studi kasus memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi tantangan spesifik, strategi pelaksanaan, dan dampak kebijakan SPM di Kabupaten Blora.

1.9.2 Situs Penulisan

Situs penulisan ini adalah Kabupaten Blora, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah keluarga kurang mampu yang memerlukan perhatian khusus dalam hal akses pendidikan. Kabupaten Blora dipilih karena representatif untuk mengkaji pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah yang memiliki berbagai tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Situs penulisan ini akan mencakup beberapa sekolah dasar dan menengah yang berada di bawah pengawasan pemerintah kabupaten. Pemilihan sekolah-sekolah tersebut akan didasarkan pada kriteria berikut: pertama, sekolah yang memiliki jumlah siswa dari keluarga kurang mampu yang cukup signifikan; kedua, sekolah yang terletak di daerah dengan akses terbatas atau wilayah pedesaan yang membutuhkan perhatian lebih dalam implementasi kebijakan pendidikan; ketiga, sekolah yang memiliki variasi dalam hal kualitas fasilitas dan sumber daya pengajaran. Penulis akan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait di sekolah-sekolah tersebut untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Penulisan ini juga akan mencakup beberapa instansi terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan SPM, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan lembaga pemerintahan yang terkait dengan kebijakan pendidikan di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik Blora, 2023).

Kabupaten Blora memiliki berbagai kondisi geografis dan demografis yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Lokasi

penulisan mencakup daerah perkotaan dan pedesaan, yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan SPM di berbagai konteks yang berbeda. Di wilayah perkotaan, fasilitas pendidikan mungkin lebih baik, namun di daerah pedesaan, tantangan seperti aksesibilitas dan kualitas sumber daya pendidikan sering kali menjadi kendala (Saragih, 2020). Pemilihan situs penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan implementasi SPM di berbagai daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut. Selain itu, penulis akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Blora, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten, serta perangkat sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Pertemuan ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan lokal yang mendukung atau menghambat implementasi SPM, khususnya dalam bidang pendidikan.

1.9.3 Subjek Penulisan

Subjek penulisan ini mencakup berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Subjek penulisan terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, pejabat dinas pendidikan dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan di Kabupaten Blora juga akan menjadi subjek penulisan. Menurut Sugiyono (2016), pemilihan subjek yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan

data yang diperoleh. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi SPM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam penulisan ini, Perangkat sekolah khususnya kepala sekolah dan guru memberikan perspektif mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah dan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik sehari-hari. Mereka juga akan memberikan informasi tentang tantangan yang dihadapi dalam memenuhi standar pelayanan minimal serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Menurut Arikunto (2019), wawancara dengan kepala sekolah dan guru dapat mengungkap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas pendidikan, termasuk ketersediaan sumber daya, dukungan dari pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Siswa dari keluarga kurang mampu memberikan perspektif tentang dampak langsung dari implementasi kebijakan SPM terhadap akses dan kualitas pendidikan. Partisipasi mereka penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini mempengaruhi keseharian mereka dan apakah ada perubahan signifikan dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan sejak kebijakan tersebut diimplementasikan. Menurut Nasution (2017), wawancara dengan siswa dan orang tua dapat mengungkapkan pengalaman nyata mereka, tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap sistem pendidikan. Melalui pendekatan ini, penulisan akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang implementasi SPM di Kabupaten Blora.

1.9.4 Jenis Data

Penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara yang diberikan kepada subjek penulisan, seperti kepala sekolah, guru, siswa dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Blora. Data ini memberikan informasi mendalam dan kontekstual mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Menurut Sutopo (2006), data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber aslinya untuk menjawab pertanyaan penulisan yang spesifik.

Data sekunder, di sisi lain, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan pemerintah, statistik pendidikan, dan literatur yang relevan dengan topik penulisan. Data ini membantu memberikan konteks yang lebih luas dan membandingkan temuan lapangan dengan data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa data sekunder penting untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif tambahan yang mungkin tidak ditemukan dalam data primer. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penulisan diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai pelaksanaan SPM di Kabupaten Blora.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan implementasi SPM di Kabupaten Blora. Sumber data primer meliputi dinas pendidikan Kabupaten Blora, kepala sekolah, guru, dan siswa

dari keluarga kurang mampu. Kepala sekolah dan guru dipilih sebagai sumber data karena mereka adalah pelaksana utama kebijakan di lapangan, sedangkan siswa dan orang tua siswa memberikan perspektif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap akses dan kualitas pendidikan (Nasution, 2017). Informasi dari sumber ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner yang dirancang untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka tentang implementasi SPM.

Sumber data sekunder mencakup dokumen kebijakan, laporan tahunan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sekretariat Daerah Blora, serta literatur akademik yang relevan. Dokumen kebijakan dan laporan tahunan memberikan informasi resmi mengenai pelaksanaan dan evaluasi SPM. Literatur akademik digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan membandingkan hasil penulisan ini dengan temuan dari penulisan lain yang sejenis (Arikunto, 2010). Dengan menggunakan sumber data yang beragam, penulisan ini berusaha untuk mencapai validitas dan reliabilitas yang tinggi.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa, untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka tentang implementasi SPM. Observasi partisipatif

dilakukan di sekolah-sekolah yang menjadi lokasi penulisan untuk melihat secara langsung pelaksanaan SPM dan mengamati interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Wawancara mendalam dirancang dengan pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terkait implementasi SPM. Penggunaan teknik pengumpulan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penulisan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian diorganisir dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penulisan. Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, penulis harus melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data melibatkan penyederhanaan dan pemilahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan bermakna. Penyajian data dilakukan dengan membuat tabel, matriks, dan diagram untuk membantu penulis memahami hubungan antara berbagai variabel. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data, serta melakukan verifikasi terhadap temuan tersebut.

Interpretasi data merupakan langkah penting dalam proses penulisan, karena memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Dalam

interpretasi data, penulis berusaha untuk memahami konteks dan implikasi dari temuan penulisan. Menurut Denzin dan Lincoln (2005), interpretasi data kualitatif melibatkan proses reflektif dan kritis untuk mengaitkan temuan dengan kerangka teori dan literatur yang ada. Penulis juga harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan faktor pendukung serta penghambat hasil penulisan, serta menjaga objektivitas dan kejujuran ilmiah. Dalam penulisan ini, interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Blora dengan teori administrasi publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan pendidikan. Penulis juga mempertimbangkan konteks lokal dan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan SPM.

1.9.8 Kualitas data

Kualitas data dalam penulisan ini dijamin melalui berbagai strategi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Validitas data mengacu pada ketepatan dan kebenaran data dalam menggambarkan fenomena yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas, penulis menggunakan triangulasi data, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Patton, 1990). Triangulasi ini membantu meminimalkan bias dan meningkatkan keandalan temuan. Selain itu, penulis juga melakukan meminta *feedback* dari responden mengenai temuan sementara untuk memastikan bahwa interpretasi penulis sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

Reliabilitas data berkaitan dengan konsistensi dan keandalan data dalam proses penulisan. Untuk memastikan reliabilitas, penulis menerapkan prosedur standar dalam pengumpulan dan analisis data, serta menjaga dokumentasi yang lengkap dan rinci (Lincoln & Guba, 1985). Penulis juga yaitu menyimpan catatan dan dokumen yang menunjukkan setiap langkah yang diambil dalam proses penulisan, sehingga penulis lain dapat mengkaji ulang dan memverifikasi temuan penulisan. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, penulis berusaha untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas yang dapat dipercaya.